

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan proses pembangunan serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan

Strategi pengarusutamaan gender sesungguhnya telah dicanangkan secara tegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Instruksi tersebut, diharapkan setiap institusi pemerintah untuk memasukkan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dan untuk menjabarkannya, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan di Daerah menegaskan keharusan dari setiap daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

Sejalan dengan kebijakan di atas, dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang adil dan demokratis, strategi PUG, perlindungan perempuan dan anak dituangkan dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021 dengan misi *Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata*”, dengan tujuan terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan strategi dan arah kebijakannya meliputi :

- Mengarusutamakan gender dan hak Anak dalam Pembangunan
- Meningkatkan kapasitas perempuan
- Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Mengembangkan model pendidikan ramah anak

Pada tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak terbitnya Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo pada 31 Desember 2016 maka urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 teralokasi anggaran sebesar Rp. **1.206.500.000** dari total APBD tahun 2016 yang berjumlah Rp. **Rp 1.945.936.335.686,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.199.737.500**; atau **99,44%**. Adapun program dan alokasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.2.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG	1.206.500.000	1.199.737.500
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.206.500.000	1.199.737.500
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	725.500.000	722.193.500
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	400.000.000	396.700.000
3.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	81.000.000	80.844.000
	JUMLAH	1.206.500.000	1.199.737.500

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh SKPD Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa :

1) Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rapat koordinasi, rapat evaluasi, sosialisasi, workshop, bintek dan pelatihan-pelatihan oleh Bagian PPPA Setda dalam rangka mendorong dan membantu SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Wonosobo untuk melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Rapat Koordinasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kegiatan Implementasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) pada SKPD digunakan untuk memfasilitasi sub kegiatan Bimbingan Teknis PPRG bagi Petugas Perencana OPD Kabupaten Wonosobo, Bimbingan Teknis bagi Tim Peneliti DPA Kabupaten Wonosobo dan Refresh

Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2014. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya perencanaan yang responsif gender, sehingga mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan laki-laki perempuan melalui manfaat yang adil dari penggunaan belanja pengeluaran pembangunan.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Hak Anak dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Forum Anak Kreatif Wonosobo (Forkos), Fasilitasi reorganisasi pengurus Forkos 2016-2018, pelatihan Capacity Building Forkos 2016-2018, Sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Undang-undang Perlindungan Anak, serta Pembentukan dan Pelatihan Forum anak Tingkat kecamatan. Tujuan dari setiap sub kegiatan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Hak Anak adalah sebagai bentuk usaha mengkampanyekan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak memfasilitasi kegiatan sosialisasi layanan PPT berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Wonosobo yang diikuti oleh guru BK SMP/MTs/SMA/MAN/SMK, mensosialisasi Undang-undang PKDRT dan Undang-undang perlindungan anak, Pelatihan Basis Komunitas (Baskom), Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Perempuan dan Anak, serta Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) atau Renstra Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai upaya pencegahan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Wonosobo menurun.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Bina Keluarga TKI dilaksanakan melalui sub kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sub kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan kasus Perdagangan Orang (human trafficking). Sub kegiatan lain yang difasilitasi oleh kegiatan ini adalah Sosialisasi Program Bidang PP dan PA bagi Bina Keluarga TKI, dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI. Sub Kegiatan Identifikasi dan Pembentukan kelompok Bina Keluarga TKI di 4 desa kantong TKI, yaitu Kelurahan Tawangsari, desa Krasak Selomerto, desa Gunturmadu Mojotengah dan Desa Dempel Kalibawang. Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan eks TKI guna mencari solusi terkait kesejahteraan bagi keluarga sekaligus mendorong pembentukan kelompok-kelompok BK TKI. Selain itu, kegiatan ini juga memfasilitasi kegiatan Rakor Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk mengkoordinasi pelaksanaan /penyelenggaraan sosialisasi, identifikasi dan pembentukan kelompok BK TKI serta pendataan buruh migran.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan memfasilitasi sub kegiatan Sosialisasi kanker servik dan payudara, sebagai usaha pencegahan dan

deteksi dini kanker servik dan payudara, dengan lokasi desa Model GISB di Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah, diikuti oleh 50 orang peserta. Selain itu, terfasilitasi sub kegiatan Rapat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu, sebagai acuan pelaporan kasus kekerasan yang tepat, cepat dan mudah. Selain itu dilaksanakan pula, pelatihan SPM bidang layanan korban kekerasan yang bertujuan agar upaya penanganan kasus kekerasan bagi perempuan dan anak dapat tepat sasaran dan terpadu. Kedua, kegiatan pelatihan ini juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan bagi peserta pelatihan dalam menangani kasus sesuai dengan 5 jenis layanan serta guna menyediakan SDM terlatih mulai dari layanan pengaduan sampai dengan rehab sosial. Sub kegiatan lain yang terfasilitasi adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan DKK Kabupaten Wonosobo bagi buruh gendong dan buruh pikul di Pasar Induk Wonosobo.

Kegiatan Optimalisasi Gerakan sayang ibu dan bayi dilaksanakan melalui rakor Gerakan sayang ibu dan anak yang diikuti oleh Tim GSIB Kabupaten dan Tim KSIB Kecamatan, yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi kegiatan program kerja GSIB tahun 2016 dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Wonosobo. Rakor GSIB tingkat desa dan pembinaan SATGAS GSIB juga dilaksanakan dalam upaya evaluasi program serta implementasi kegiatan GSIB di tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa Model GSIB. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pungangan Mojotengah. Melalui kegiatan ini, terfasilitasi pula Kegiatan Penghargaan Pemenang Gerakan sayang Ibu dan Bayi Tingkat Kabupaten Wonosobo dengan hasil, Pemenang Terbaik I Kecamatan Mojotengah, Juara Pemenang Terbaik II Kecamatan Kalikajar dan Pemenang terbaik III Kecamatan Garung.

Kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak SIGA dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan yaitu rapat persiapan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak kabupaten Wonosobo, Rapat Ekspose Sistem Informasi Gender dan Anak serta pengembangan aplikasi WEB SIGA. SIGA adalah manajemen pendokumentasian data gender dan anak yang berbasis aplikasi web yang dapat digunakan sebagai perencanaan, pelaksanaan dan monev terkait dengan ketersediaan data pilah gender.

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2016, bekerjasama dengan UPIPA, telah terdampingi 162 kasus kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Wonosobo. Pendampingan dilakukan dengan mendampingi korban melalui konseling, pendampingan layanan medis, layanan hukum dan spiritual. Pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPPI dan Organisasi Wanita dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan memfasilitasi kegiatan Pendidikan

Politik Masyarakat yang diikuti oleh 95 orang pengurus dan anggota KPPI, Organisasi Wanita serta TP PKK Kabupaten Wonosobo, serta pelatihan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan bagi anggota KPPI dan GOW yang diikuti oleh 65 orang anggota KPPI dan Organisasi Wanita di Wonosobo. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan PP PA dengan PKK, KPPI dan GOW Kabupaten Wonosobo, meningkatkan kapasitas Organisasi Wanita Kabupaten Wonosobo dalam hal pendidikan politik masyarakat/perempuan, mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan berbagai persoalan dan isu perempuan dan anak di kabupaten Wonosobo, serta bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30%. Selain itu, terfasilitasi juga sub kegiatan lain berupa rapat koordinasi Organisasi Wanita yang diselenggarakan di Gedung wanita Kabupaten Wonosobo, yang diikuti oleh 55 orang anggota Organisasi Wanita di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan sosialisasi undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan dan syarat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol, sosialisasi dampak psikososial korban pelecehan seksual pada anak serta sosialisasi undang undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pemetaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kewirausahaan (DBHCHT) memfasilitasi beberapa sub kegiatan yaitu :

- Rakor Sinergisitas PPEP yang dilaksanakan di desa Ropoh, diikuti 25 orang peserta. Tujuan dari kegiatan ini adalah persiapan kegiatan pendampingan PPEP dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, peningkatan semangat dan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas kelompok usaha kecil melalui peningkatan partisipasi perempuan dengan metode ABCD (*Aset Based Community Development*) serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi perempuan.
- Sosialisasi Pembentukan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) yang diikuti oleh 70 orang peserta, dilaksanakan di RM Sari Rasa. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas permasalahan perempuan/isu-isu gender yang terkait dengan ekonomi di kabupaten Wonosobo, Meningkatkan Kapasitas Perempuan Usaha Kecil (PUK), membangun kesepakatan untuk menginisiasi jaringan yang peduli terhadap isu perempuan dan pengembangan ekonomi mikro bagi perempuan tingkat kabupaten serta sebagai sarana sosialisasi

pembentukan jaringan perempuan usaha kecil (JARPUK) di kabupaten Wonosobo.

- Rakor desa Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan di desa Pulosaren , diikuti oleh 25 orang pengurus anggota PPEP. Tujuan sub kegiatan ini adalah membentuk kelompok PPEP baru sehingga akan meningkatkan peran serta perempuan dalam meningkatkan taraf ekonomi perempuan di Desa Miskin, meningkatkan semangat dan produktifitas ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas kelompok usaha kecil melalui peningkatan partisipasi perempuan dengan metode ABCD (*Aset Based Community Development*) serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi perempuan.

Dilaksanakan pula subkegiatan pelatihan Pengorganisasian kelompok, Penguatan dan Pengembangan kelompok, Pelatihan Penyadaran Gender, Pelatihan Analisis sosial, Pelatihan pengolahan sumber daya lokal, pelatihan diskusi kampung dan monev partisipatif yang kesemuanya bertujuan untuk membangun sikap terhadap hak-hak perempuan untuk meningkatkan ekonomi perempuan/keluarga, memberikan pemahaman kepada kelompok PPEP, bahwa PPEP diawali dari analisis sumber daya lokal, manajemen ekonomi rumah tangga, lembaga keuangan, kelompok maupun jaringan perempuan usaha kecil serta sebagai upaya penyadaran kritis perempuan terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Dilaksanakan Pelatihan Tataboga dan packaging yang dilaksanakan di desa Kaliwiro, Kelurahan Wonosobo timur dan desa Pulosaren. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pelatihan tataboga dan packaging aneka kue kering dan kue basah , meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan khususnya perempuan usaha kecil, meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok usaha kecil melalui pelatihan tataboga dan packaging serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama perempuan.

Kegiatan Kampanye Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui hari Kartini, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu

Kegiatan Kampanye Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui hari Kartini, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu ini mefasilitasi beberapa subkegiatan, yaitu :

- Seminar Peningkatan Capacity Building bagi Perempuan yang diikuti oleh 100 orang peserta terdiri dari perwakilan unsur KUA, PGRI, TP.PKK, KUPT Dikbudpora dan kelompok Basis Komunitas. Seminar ini mengangkat isu tentang peningkatan usia perkawinan pertama bagimasyarakat terkait dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan, dan perkembangan fisik, mental spiritual.

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Seminar jiwa interpreneur bagi remaja yang diikuti oleh 100 orang peserta, siswa siswi SLTP dan SLTA serta Tim Panitia Hari Anak Nasional, yang mengangkat tema tentang penghormatan terhadap hak-hak anak dan pemberian jaminan terhadap pemenuhan tanpa perlakuan diskriminatif
- Seminar Perlindungan Perempuan yang mengangkat tema Perempuan Anti Korupsi (SAPK) dengan narasumber Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Forkompinda beserta isteri, Kepala OPD, Organisasi wanita, TP PKK, Dharma wanita serta tokoh perempuan. Didalam Seminar ini juga dibahas tentang macam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001.
- Kegiatan ini juga memfasilitasi sub kegiatan pelaksanaan upacara dan resepsi hari Kartini yang diikuti oleh 315 orang peserta, terdiri dari unsur Forkompinda beserta istri, OPD, Organisasi Perempuan, TP PKK, Dharmawanita.
- Selain hari kartini, sub kegiatan lain yang difasilitasi adalah upacara resepsi Hari anak Nasional dan Upacara resepsi Hari Ibu.

Peningkatan Kegiatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada beberapa sub kegiatan yang difasilitasi melalui kegiatan ini, yaitu: Sarasehan Pernikahan Dini, Lomba pidato Bahasa Jawa, HUT GOW, Musyawarah kerja GOW, Sarasehan Parenting, sarasehan bagi remaja, tentang penganggulangan perilaku seksual, Lomba dolanan anak, seminar kesehatan lansia, pelatihan pembuatan aksesoris dari manik-manik, raker penyusunan renstra yang dikaitkan dengan program kerja yang bersinergis dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, terfasilitasi juga rapat koordinasi BKOW, pelatihan packaging, pendidikan politik bagi perempuan, lomba jurnalistik dengan tema pemberdayaan perempuan, pelatihan protokol, penertiban buletin Lentera serta sarasehan sehat ceria di hari tua.

Kegiatan Pemberdayaan Istri PNS melalui Organisasi Dharma Wanita memfasilitasi beberapa sub kegiatan, yaitu : Sosialisasi yang bertema Save The Children berisi tentang gerakan anti kekerasan seksual dan bahaya narkoba bagi anak, Pelatihan etika Pergaulan, pengembangan pribadi, dan table manner, Pembinaan Administrasi Dharma Wanita Persatuan Munas II, Sosialisasi Program Dharma Wanita melalui Talkshow di radio Pesona FM, Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan, Fasilitasi kegiatan HUT ke 16 DWP Kabupaten Wonosobo, fasilitasi rapat pengurus dan raker bulanan Dharma Wanita, serta Fasilitasi pemasangan website Dharma Wanita yang bertujuan untuk menyebarluaskan semua kegiatan Dharmawanita kabupaten Wonosobo terkait dengan program kerja dan kegiatan serta mengembangkan DWP sebagai organisasi modern dengan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memfasilitasi tiga sub kegiatan yaitu, Rapat Koordinasi Pengisian Formulir PP dan PA, Rapat Koordinasi Pengecekan Pengisian Format APE dan rapat Koordinasi Persiapan verifikasi evaluasi pelaksanaan pembangunan PP dan PA. Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah untuk mensinkronisasi peran masing-masing OPD dalam rangka perolehan APE Kabupaten Wonosobo tahun 2016.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dilaksanakan melalui sub kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan data pilah Gender dan anak, Croscek data pilah gender, Rakor pokja PUG Persiapan data pilah gender 2017, FGD Pemaparan draft RAD PUG, rapat pembahasan RAD PUG. Tujuan dari keseluruhan kegiatan ini adalah ketersediaan data pilah yang dapat digunakan sebagai acuan pembuatan perencanaan, kebijakan berperspektif gender.

Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga dilaksanakan oleh Dinas pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan Sukoharjo, berupa:

3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan dan juga meningkatkan kapasitas manajemen organisasi perempuan. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut:

- Pencegahan Kekerasan Pada Anak sekolah dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan
- Kegiatan PKK

c. Capaian Kinerja Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mengetahui capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat dari beberapa indikator dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.C.2.2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator	Capaian kinerja	
		2015	2016
1	Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (Σ Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah) / (Σ Pekerja Perempuan) x 100%	4030/171913 x 100% = 2.34	3.529/171.913 x 100% = 2,05

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Capaian kinerja	
		2015	2016
2	Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas (Σ perempuan usia >15 tahun yang melek huruf / (Σ jumlah perempuan usia >15 tahun) x 100%	235.447/ 239653 x 100% = 98,24	281.248/ 284.987 x 100% = 98,69
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Σ Angkatan kerja perempuan) / (Σ Penduduk usia kerja perempuan) x 100%	168129/ 280712x100% = 59,89	181056/ 283.551x100 %= 63,85

Sumber: Badan KKBPPA 2016

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah tahun 2016 sebagaimana pada tabel di atas tampak bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2,05 % dari jumlah seluruh populasi perempuan bekerja di Kabupaten Wonosobo. Secara rinci, jumlah pegawai perempuan dibanding jumlah pegawai laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.C.2.3
Jumlah Perempuan yang terlibat dalam Lembaga Pemerintahan

DATA	Jumlah		
	L	P	Total
PNS	3840	3529	7369
Menduduki Jabatan :			
II.A	1	0	1
II.B	17	0	17
III.A	49	5	54
III.B	67	15	82
IV.A	262	107	369
IV.B	39	47	86

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan sudah cukup proporsional, yaitu sekitar 47.49% dari jumlah seluruh pegawai pemerintahan. Namun, melihat data perempuan pengambil keputusan di lembaga pemerintahan masih sangat rendah. Dari 17 posisi jabatan pemangku eselon II.B, tidak ada yang terisi oleh pejabat perempuan. Begitu pula untuk selon di bawahnya, eselon III.A hanya terisi 9% oleh pegawai perempuan, eselon III.B terisi 18% oleh perempuan.

Dalam bidang pendidikan, dari data di atas tampak bahwa angka melek huruf perempuan di atas usia 15 tahun yang mencapai 98,67%,naik 0.43%dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 98.24%. Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2016, yaitu 96.49%

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hampir semua perempuan usia di atas 15

tahun telah dapat membaca dan menulis. Namun membaca dan menulis saja tidaklah cukup. Tingkat Pendidikan perempuan di Kabupaten Wonosobo masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.C.2.4
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	L	P
≤SD	186291	197577
SLTP	55114	49606
SLTA	36898	28329
DI/II/III/Akademi	5154	1998
Universitas	6295	6041
Jumlah	289.752	283.551

Dapat dilihat bahwa terdapat 69.67% perempuan dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan , yang hanya lulus SD. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya perempuan masih harus ditingkatkan.

Sementara itu, tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja sekitar 63.85%. Artinya tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja cukup tinggi tetapi jika dilihat dari data tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel IV.C.2.4, yang menunjukkan tingkat pendidikan perempuan yang rendah, mengindikasikan bahwa pekerjaan yang ditekuni bukanlah pekerjaan formal.

Tabel IV.C.2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	92,51	92,91
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	45,36	47,72
3	Persentase Anggaran Responsif gender (Σ anggaran responsive gender/ total anggaran x 100)	$29.480.040.000/582.588.362.888 \times 100 = 0,13$	$23.596.364.000/529.482.873.601 \times 100 = 0,13$
4	Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA (Σ desa yang menganggarkan Responsif Gender/ Σ desa x100)	10	$29/236 = 12,81$
5	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani (Σ anak berhadapan dengan hukum/ Σ anak yang mendapat pendampingan dalam	$11/11 \times 100 = 100\%$	$6/6 \times 100 = 100\%$

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
	menghadapi hukum x 100)		
6	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani (Σ aduan korban anak yang tertangani/ Σ aduan korban anak x 100)	$71/71 \times 100 = 100\%$	$71/71 \times 100 = 100\%$
7	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani (Σ aduan korban kekerasan/ Σ aduan dengan korban kekerasan x 100)	$107/107 \times 100 = 100\%$	$90/90 \times 100 = 100\%$
8	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	5	6
9	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	5	6
10	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional Σ tenaga kerja yang profesional/ Σ tenaga kerja perempuan x 100)	$4.024/171.913 \times 100 = 38,21$	38,21
11	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	$2/45 \times 100 = 4,44$	$2/45 \times 100 = 4,44$
12	Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan (Σ ASN perempuan/ Σ ASN x 100)	$4.024/8436 \times 100 = 47,71$	$4.412/8.802 \times 100 = 50,12$
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Σ tenaga kerja perempuan/ Σ tenaga kerja x 100)	63,81	$4.390/181.056 \times 100 = 2,42$
14	Rasio KDRT perempuan (Σ KDRT yang dilaporkan/ Σ KDRT perempuan dilaporkan x 100)	$178/107 = 4,11$	$161/90 = 4,11$
15	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (Σ tenaga kerja usia anak/ Σ anak x 100)	20%	NA
16	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas (Σ perempuan melek huruf/ Σ perempuan x 100)	96,49	$13.550/335.887 \times 100 = 4,03$
17	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Σ kasus kekerasan terhadap anak/ Σ anak x 100)	$71/224.208 \times 100 = 2,7$	$71/224.208 \times 100 = 2,7$
18	Persentase desa ramah anak (Σ desa dengan program ramah	$7/265 \times 100 = 1,5$	$7/265 \times 100 = 1,51$

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator	Capaian Kinerja	
	anak/ Σ desa x 100)		
19	Persentase puskesmas ramah anak (Σ puskesmas dengan program ramah anak/ Σ puskesmas x 100)	18%	$15/24 \times 100 = 62,5$
20	Persentase sekolah ramah anak (Σ sekolah ramah anak/ Σ sekolah SD+SMP x 100)	0	$15/577 \times 100 = 2,59$

Sumber: Badan KBPPPA, 2016

Dengan melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa angka capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2016 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses penghitungan. Sementara itu untuk data tahun 2015, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 92,51 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 45,36. Capaian angka IPG dan IDG tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo masih perlu ada penekanan kegiatan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebanyak 161 kasus yang pada tahun 2015 yang lalu sejumlah 178 kasus. Walaupun mengalami penurunan, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Kondisi ini selayaknya menjadi perhatian bersama baik pihak Pemkab Wonosobo maupun masyarakat secara umum, dan menjadi alasan kuat untuk lebih menguatkan kembali fungsi dan peran keluarga sebagai benteng pertahanan utama dimana perempuan dan anak-anak tinggal dan tumbuh berkembang.

Berikut adalah tabel jumlah angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo:

Tabel IV.C.2.6
Jumlah Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Terjadi
di Kabupaten Wonosobo

Jumlah Kasus	2015	2016
Kekerasan terhadap Perempuan	107	90
Kekerasan terhadap anak	71	71

Semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, hal tersebut merupakan bentuk perhatian yang serius terhadap upaya perlindungan kepada perempuan dan anak oleh Pemkab Wonosobo. Selain itu, tertanganinya semua kasus tersebut juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tersedianya lembaga dan unit-unit pelayanan pengaduan korban kekerasan berbasis gender dan anak, dan juga meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta korban sendiri untuk melapor.

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak, telah didirikan unit-unit ramah anak. Pada

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tahun 2016, terfasilitasi pendampingan Puskesmas ramah anak. Dari 24 Puskesmas Ramah anak yang ada di Wonosobo, sudah terdampingi 15 Puskesmas, atau 62.5%. Artinya sudah melampaui target di RPJMD yaitu 18%.

Telah terfasilitasi pula Desa ramah anak. Tahun 2016 telah terdampingi 6 desa 1 kelurahan, atau sekitar 2.64% dari jumlah seluruh desa di Wonosobo yang berjumlah 265 desa. Angka ini juga sudah melampaui target RPJMD sebesar 1.5%

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selamatahun 2016masih terdapat beberapa permasalahanserta upaya yang perlu diupayakan yaitu:

Tabel IV.C.2.7
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya tenaga yang berkompeten menangani,memberikan pelayanan dan melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak	Diperlukan kerjasama dan pelibatan pihak-pihakluar yang berkompeten dalam masalah perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak
2.	Belum terintegrasinya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan institusi kejaksaan dan pengadilan	Mendorong agar korban mau melapor supaya pelaku kekerasan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku
3.	Konsep dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utama HakAnak(PUHA) belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak, sehingga dalam implementasinya kurang maksimal.	Masih perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4.	Masih lemahnya koordinasi antar lembaga pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hakanak (PUHA)	Perlu dilakukan secara lebih intensif pertemuan dan rapat koordinasi bagi kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
5.	Adanya Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan control sertapartisipasi dalam pembangunan.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan.
6.	Proses dan mekanisme perencanaan yang responsif gender sudah difahami oleh semua perencana tetapi belum diimplementasikan secara maksimal di SKPD sehingga program dankegiatan yang responsif gender belum sepenuhnya terlaksana.	Perlu proses pendampingan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di semua SKPD yang terkait, karena pada prinsipnya program dan kebijakan responsif gender masih perlu diintegrasikan kedalam seluruh bidang pembangunan melalui berbagai kegiatan di berbagai SKPD yang terkait